

Rencana Akh

# RENJA TAHUN

2025



*Dinas Kependudukan  
Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan An*



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

**Pasal 2**

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
  - BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
  - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
  - BAB V. Penutup.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendapatan serta pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan..

Tahun 2025 merupakan dokumen pencapaian tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan untuk 5 (lima) tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025-2029. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Melalui RENJA diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Samarinda, 30 Juli 2024

Kepala Dinas,



Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT

Pembina Utama Muda

Nip. 19651215 198601 2 002

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	37
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	72
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	74
3.3 Program dan Kegiatan	76
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	103
BAB V PENUTUP	129
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DKP3A Tahun 2018 – 2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan periode sebelumnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan. Pada level pemerintah daerah disusun Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD), Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) maupun Perencanaan Tahunan (RKPD) dan untuk level perangkat daerah disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) serta Rencana kerja-Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Secara hierarki penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rancangan RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD tersebut. Renja Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Perangkat Daerah/Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengatur bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah salah satu jenis perangkat daerah adalah dinas yang mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pamanantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian terjadi perubahan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari badan menjadi Dinas, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) berubah menjadi Dinas Kependudukan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (DKP3A) dengan mandat 3 urusan yaitu pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya Renja Dinas DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja DKP3A Provinsi Kaltim Tahun 2025 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
20. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja DKP3A Provinsi Kaltim Tahun 2025 adalah untuk merumuskan rencana kerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

#### 2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Akhir DKP3A Provinsi Kaltim Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dan evaluasi program kegiatan dalam penyusunan rencana anggaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja DKP3A Provinsi Kaltim

Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

1.2 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

## BAB II

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF). Untuk Dana APBD sebesar RpRp31.566.835.247,- dan dan DAK-NF sebesar Rp 451.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.042.477.120,- atau 93,04%. Secara rinci tertuang dalam table berikut :

Tabel 2.1

Realisasi anggaran dan fisik DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023	
			KEUANGAN (Rp)	SISA DANA (Rp.)
	<b>TOTAL BELANJA</b>	31.566.835.247	29.308.767.652	2.258.067.595
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	633.120.000	630.713.866	2.406.134
2.08.01.1.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	633.120.000	630.713.866	2.406.134
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,344,839,000	7,893,688,511	920.103.513
2.08.01.1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,344,839,000	7,893,688,511	920.103.513
2.08.01.1.06.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah	989,167,624	938,989,590	16.214.525
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	989,167,624	938,989,590	16.214.525
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,137,648,540	1,736,289,915	31.053.880
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,137,648,540	1,736,289,915	31.053.880
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,571,183,635	1,163,129,305	537.261.283
2.08.01.1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,571,183,635	1,163,129,305	537.261.283

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023	
			KEUANGAN (Rp)	SISA DANA (Rp.)
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	950.000.000	945.824.878	4.175.122
2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	550.000.000	549.888.497	111.503
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	300.000.000	296.274.210	3.725.790
2.08.02.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	100.000.000	99.662.171	337.829
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	350.000.000	345.659.459	4.340.541
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	200.000.000	198.088.466	1.911.534
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	150.000.000	147.570.993	2.429.007
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	400.000.000	397.640.578	2.359.422
2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	137.440.000	136.961.624	478.376
2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	135.630.000	134.017.896	1.612.104
2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	126.930.000	126.661.058	268.942
2.08.03.1.01.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	789.200.000	668.348.298	183.751.702
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	789.200.000	668.348.298	183.751.702

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023	
			KEUANGAN (Rp)	SISA DANA (Rp.)
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	482.798.657	17.201.343
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	482.798.657	17.201.343
2.08.03.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	74.596.000	71.120.000	3.476.000
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	74.596.000	71.120.000	3.476.000
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	692.400.000	681.069.384	11.330.616
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	448.400.000	440.596.622	7.803.378
2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	244.000.000	240.472.762	3.527.238
2.08.06.1.01.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	156.600.000	151.734.484	4.865.516
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	156.600.000	151.734.484	4.865.516
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	196.400.000	184.862.905	11.537.095
2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	98.000.000	86.767.888	11.232.112
2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	98.400.000	98.095.017	304.983
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	336.000.000	293.424.274	42.575.726
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	336.000.000	293.424.274	42.575.726
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	880.000.000	842.330.404	37.669.596
2.08.07.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	880.000.000	842.330.404	37.669.596

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023	
			KEUANGAN (Rp)	SISA DANA (Rp.)
2.12.02.1.01.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	1.624.150.000	1.595.591.384	28.558.616
2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	1.624.150.000	1.595.591.384	28.558.616
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	278.000.000	275.502.763	2.497.237
2.12.03.1.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	278.000.000	275.502.763	2.497.237
2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	498.000.000	492.073.798	5.926.202
2.12.04.1.01.02	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	498.000.000	492.073.798	5.926.202
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1.377.400.000	1.357.195.654	20.204.346
2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1.377.400.000	1.357.195.654	20.204.346
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.027.500.000	975.673.425	51.826.575
2.14.03.1.01.05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	880.000.000	850.650.992	29.349.008
2.14.03.1.01.07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	70.000.000	51.610.985	18.389.015
2.14.03.1.01.08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	77.500.000	73.411.448	4.088.552
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	953.300.000	937.410.799	15.889.201
2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	953.300.000	937.410.799	6,248,142

### 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu

#### 1. Program Perlindungan Perempuan

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan

### 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan DKP3A Provinsi Kalimantan timur secara keseluruhan di tahun 2023 terlaksana atau terealisasi dengan cukup baik dapat dilihat dari realisasi keuangan sebesar 92,85 %, hal ini didukung oleh anggaran dan sumber daya yang memadai.

### 2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan secara keseluruhan program dan kegiatan pada DKP3A provinsi Kalimantan timur di tahun 2023 terlaksana sesuai dengan target kegiatan. DKP3A telah berupaya untuk terus menjalankan aktifitas program/kegiatan khususnya terkait pelayanan masyarakat dan program prioritas.

Secara umum program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran juga adanya dukungan sarana dan prasarana lainnya. Secara rinci faktor pendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang memadai.
2. Adanya kebijakan PUG Kalimantan Timur sebagai pedoman Pelaksanaan dalam Terwujudnya Pembangunan yang setara dan berkeadilan.
3. Adanya regulasi dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui melalui satgas perlindungan perempuan dan anak.
4. Tiga Urusan dalam Institusi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur memberi kemudahan dalam penyediaan dan pemanfaatan data, baik data administrasi kependudukan, data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, data Keluarga Berencana sebagai bahan informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM, PUSPAGA, PUSPA, Kampung KB, dll)

#### 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- Dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan penetapan Renstra Perangkat daerah
- Kurang Maksimalnya operasional rutinitas DKP3A Provinsi Kalimantan Timur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada.
- Masih Belum tersedianya Data pilah Gender secara baik pada setiap Perangkat Daerah
- Perangkat daerah belum menuangkan PPRG menjadi dasar dalam pencapaian kinerja Program Kegiatan.
- Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak (data pilah) yang aktif.
- Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer.
- Sifat Tugas kewenangan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan keberhasilan program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya ( Dinas Tenaga Kerja, Disperindakop, Perbankan, dll).
- Terbatasnya jumlah ADB (Administrator Data Base) dalam pengendalian administrasi kependudukan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

- Melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan
- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemangku kepentingan

- Meningkatkan komitmen antar unit kerja
- Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas sumber daya melalui program dan kegiatan
- Konsisten dalam kualitas target dan indikator kinerja

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur  
s/d Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Indeks kualitas pelayanan kesekretariatan	82 indeks	90 %	95%	90%	94,74%	95%	90%	100%
		Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,50 %	71 %	100 %	100 %	100%	70,50%	76,00%	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA -SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-

	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen forum perangkat daerah	3 Laporan	1 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>94,00 %</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100 %</b>	<b>92 %</b>	<b>100%</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2 bulan</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang/bulan	44 orang	41 orang	44 orang	100%	1 tahun	1 tahun	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhirtahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akg=hir tahun	1 Laporan	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah lapoan keuagamm bulanan/triwulan/semesteram SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulnan/triwulan/semestrean SKPD	16 Laporan	3 dokumen	4 laporan	4 laporan	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelapon dan analis prognosis realiasi anggaran	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>80 Orang</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas pegawai	3 Paket	4 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	85 orang	44 Orang	34 Orang	75 Orang	220%	44 Orang	44 Orang	100%
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumah orang yang mengikuti sosialisas	85 orang	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>111 unit</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	1 paket	1 tahun	4 paket	4 paket	100%	5 komponen	5 komponen	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	6 item	6 item	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 paket	26 paket	2 paket	2 paket	100%	26 item	26 item	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	96 dokumen	300 eksemplar	84 dokumen	84 dokumen	100%	300 eksemplar	300 eksemplar	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	1 laporan	75 orang	1 laporan	1 laporan	100%	75 orang	75 orang	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen rapat koordinasi daerah SKPD	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Penatausahaan arsip dinasmis pda SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinasmis pda SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusn pemerintah daerah</b>	<b>32 unit</b>	<b>90%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>	<b>90%</b>	<b>109,76 %</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	30 unit	5 unit	25 unit	25 unit	100%	5 unit	5 unit	100%

	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	-	-	-	-	.-	.-	.-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>4 jenis jasa</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa surat menyurat yang tersedia	1 laporan	600 eksemplar	1 laporan	1 laporan	100%	800 eksemplar	600 eksemplar	75%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 tahun	1 tahun	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	1 laporan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	100%	4 unit	4 unit	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>86 unit</b>	<b>11 unit</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>11 unit</b>	<b>12 unit</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang tersedia	1 unit	15 unit	15 paket	15 paket	100%	15 unit	15 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	24 unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	1 unit	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	6 ruang	6 ruang	100%

	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirasusahaan</b>	<b>400 orang</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>100%</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>100%</b>
		<b>Implementasi kelembagaan PUG</b>	<b>-</b>	<b>7 lembaga PUG</b>	<b>1 kebijakan</b>	<b>1 kebijakan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) di dampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirasusahaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>400 orang</b>	<b>400 orang</b>	<b>100%</b>
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	<b>Penguatan lembaga PUG kewenangan provinsi</b>	<b>10 Lembaga</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 orang</b>	<b>400 orang</b>	<b>100%</b>
		<b>Penguatan lembaga PUG</b>	<b>-</b>	<b>1 kebijakan</b>	<b>1 kebijakan</b>	<b>1 kebijakan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi</b>	<b>jumlah dokumen pelaksanaan PUG</b>	<b>-</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggara PUG tingkat provinsi</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100%</b>
	<b>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah peserta Pendampingan dan advokasi PUG</b>	<b>-</b>	<b>75 Peserta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89%</b>	<b>75 Peserta</b>	<b>75 Peserta</b>	<b>100%</b>

		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	-	-	35 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	89%	-	-	-
		Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		jumlah SDM tingkat provinsi yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggara PUG	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Sosialisasi pelaksanaan kebijakan PUG	100 orang	150 Peserta	-	-	89%	150 Peserta	150 Peserta	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender(PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	-	-	35 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	89%	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	-	-	-	-	-	130 Orang	130 Orang	100%
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi</b>	<b>Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum</b>	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100%</b>	-	-	-
		<b>Jumlah Organisasi Masyarakat Menuju LPLPP</b>	<b>1 Lembaga</b>	-	-	-	-	<b>1 Lembaga</b>	<b>1 Lembaga</b>	<b>100%</b>

		<b>Pengembangan SDM Perempuan Bidang Politik dan hukum</b>	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	450 orang	-	-	-	-	190 Peserta	430 Peserta	100%
		Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dan bidang politik hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2 lembaga	-	10 organisasi	10 organisasi	100%	-	-	-
		Jumlah organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi kepada organisasi masyarakat di kab/kota	-	30 organisasi masyarakat	-	-	-	2 lembaga	2 lembaga	100%
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</b>	<b>300 Orang</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>400 Orang</b>	<b>400 Orang</b>	<b>100%</b>

		Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	-	10 lembaga	10 lembaga	100%	-	-	-
		Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 lembaga	-	-	-	-	1 lembaga	1 lembaga	100%
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	300 orang	50 orang	100 orang	100 orang	100%	500 peserta	500 peserta	100%
		Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	-	25 lembaga	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	-	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-

	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</b>	<b>23,24 %</b>	-	-	-	-	<b>23,46 %</b>	<b>23,46 %</b>	<b>100%</b>
		<b>Kebijakan Perlindungan Perempuan</b>	-	<b>4 Kebijakan</b>	<b>2 Kebijakan</b>	<b>2 Kebijakan</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan</b>	<b>10 lembaga</b>	-	-	-	-	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>100%</b>
		Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	--	-	-
		jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	-	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	-	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	10 Perangkat Daerah	25 perangkat daerah	-	-	-	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100%

		Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan lintas Daerah Kab/Kota	-	-	10 layanan	10 layanan	100%	-	-	-
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu</b>	<b>80%</b>	-	-	-	-	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
		jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	-	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	40 Orang	0,29 %	80 orang	99 orang	123,75 %	30 orang	30 orang	100%
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Penguatan lembaga penyedia layanan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada unit penyedia layanan	-	<b>30 orang</b>	<b>15 orang</b>	<b>15 orang</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta lembaga penyedia layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-

		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	-	15 orang	15 orang	100%	-	-	-
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Predikat kabupaten/kota layak anak</b>	<b>90%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
		<b>Penguatan Pemenuhan Hak Anak</b>	-	<b>3 Kebijakan</b>	<b>3 Kebijakan</b>	<b>3 Kebijakan</b>	-	-	-	-
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan pelembagaan PHA</b>	<b>10 lembaga</b>	-	-	-	-	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>100%</b>
		Penguatan pelembagaan PHA	-	<b>1 Kab/Kota</b>	<b>1 Kab/Kota</b>	<b>1 Kab/Kota</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	30 perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dunia usaha kewenangan provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	-	-	-	-	-	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	100%

		Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	-	30 organisasi	-	-	-	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	-	-	30 organisasi perangkat daerah	35 organisasi perangkat daerah	100%	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	-	-	-	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>100%</b>
		<b>Jumlah dokumen penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak</b>	-	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100%</b>	-	--	-
		<b>Penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak</b>	-	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	-	-

	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
		Jumlah dokumen KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
		Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak</b>	<b>3,88%</b>	-	-	-	-	<b>4,07 %</b>	<b>4,07 %</b>	<b>100%</b>
		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak</b>	-	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan</b>	<b>1 lembaga</b>	-	-	-	-	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>100%</b>

		<b>dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak</b>	-	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	<b>80 layanan</b>	-	-	-	-	<b>75 layanan</b>	<b>75 layanan</b>	<b>100%</b>
		<b>Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak</b>	-	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi</b>	-	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	40 orang	-	-	-	-	30 orang	30 orang	100%
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	50 orang	-	-	-	-	30 orang	30 orang	100%

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase Capaian Data Gender dan anak</b>	<b>80%</b>	<b>70%</b>	-	-	-	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
		<b>Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah</b>	-	-	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</b>	<b>20 data</b>	-	-	-	-	<b>20 data</b>	<b>20 data</b>	<b>100%</b>
		<b>Capaian Data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah</b>	-	<b>70%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender Provinsi yang Tersedia	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Data anak Provinsi yang Tersedia			1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	
		Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%

	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
	<b>BIDANG FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk</b>	<b>80%</b>	-	-	-	-	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
		<b>Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk</b>	-	<b>6 Kebijakan</b>	<b>6 Kebijakan</b>	<b>4 Kebijakan</b>	<b>66,67%</b>	-	-	
	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota Se-Kaltim</b>	-	<b>6 Dokumen</b>	<b>1 kebijakan</b>	<b>1 kebijakan</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	<b>Penyelenggaraan pendaftaran kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk</b>	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100%</b>
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	-	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	-	-
	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%

	<b>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk</b>	<b>jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk</b>	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100%</b>
	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	jumlah laporan hasil bimbingan teknis pendaftaran penduduk	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
		<b>Kebijakan terkait pencatatan sipil</b>	-	<b>6 Kebijakan</b>	<b>6 Kebijakan</b>	<b>3 Kebijakan</b>	<b>66,67%</b>	-	-	
	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	<b>2 dokumen</b>	-	-	-	-	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>100%</b>
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah kebijakan teknis di bidang catatan sipil yang telah ditetapkan	-	1 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Pelayanan pencatatan sipil	jumlah kebijakan terkait pelayanan catatan sipil Kab/Kota se Kaltim	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 laporan	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	<b>Pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	<b>jumlah dokumen Pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	<b>1 laporan</b>	-	-	-	-	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>100%</b>
	Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%

	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Publikasi data kependudukan skala provinsi</b>	<b>2 kali</b>		-	-	-	<b>2 kali</b>	<b>2 kali</b>	<b>100%</b>
		<b>Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan</b>	-	<b>5 Kebijakan</b>	<b>5 Kebijakan</b>	<b>5 Kebijakan</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah data kependudukan</b>	-	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan</b>	<b>28%</b>		-	-	<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	1 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%		-	--
	Penyusunan tata cara pengelola data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat dan data pribadi di provinsi dan kab/kota	Jumlah dokumen hasil penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan. data agregat dan data pribadi di prov dan kab/kota	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%

	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
	<b>[ KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	100%
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	40 orang	-	-	-	-	40 orang	40 orang	100%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Angka kelahiran total</b>	<b>55 %</b>	-	-	-	-	<b>2,10%</b>	<b>2,10%</b>	<b>100%</b>
		<b>Kebijakan tentang pengendalian penduduk</b>		<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</b>	<b>5 sektor</b>	-	-	-	-	<b>5 sektor</b>	<b>5 sektor</b>	<b>100%</b>

		<b>kebijakan tentang pengendalian penduduk</b>	-	<b>1 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	-	-	3 laporan	3 laporan	100%	-	-	-
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 laporan	-	3 laporan	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 laporan	-	2 laporan	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Angka prevalensi kontrasepsi modern</b>	<b>68,42 %</b>	-	<b>68,42</b>	<b>68,42</b>	-	<b>67,98%</b>	<b>67,98%</b>	<b>100%</b>
		<b>Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	-	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	-	-	-

	<b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Ratio akseptor KB</b>	<b>0,76 %</b>	<b>-</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,76%</b>	<b>-</b>	<b>0,76 %</b>	<b>0,76 %</b>	<b>100%</b>
		<b>Peningkatan jumlah peserta KB</b>	<b>-</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	-
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 daerah	-	1 daerah	1 daerah	-	1 daerah	1 daerah	100%

	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	-	1 daerah	1 daerah	-	1 daerah	1 daerah	100%
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Peningkatan SDM ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	-	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>100%</b>	-	-	-
		<b>Indeks pembangunan keluarga (IBANGGA)</b>	<b>65,54 indeks</b>	-	<b>65,54 indeks</b>	<b>65,54 indeks</b>	-	<b>63,64 indeks</b>	<b>63,64 indeks</b>	<b>100%</b>
	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100%</b>	-	-	-
		<b>Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan perempuan</b>	<b>4 organisasi</b>	-	-	-	-	<b>4 organisasi</b>	<b>4 organisasi</b>	<b>100%</b>
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

	Fasilitasi pengembangan kelompok PIK -R di kampung KB	Jumlah PIK-R yang mengikuti pengembangan kelompok PIK -R di kampung KB	1 organisasi	-	2 organisasi	1 organisasi	-	1 organisasi	1 organisasi	100%
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	persentase organisasi Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga	40%	-	40 %	%0 %	-	30%	30%	100%
	Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	Jumlah laporan hasil Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	-	-	1 laporan	100%



	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen forum perangkat daerah	19 dokumen	19 dokumen	1 dokumen	23 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	
	Pelaksanaan forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah berita acara forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	2 berita acara	-	-	-	-	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>2 bulan</b>	<b>94,00 %</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2 bulan</b>	<b>94,00 %</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 orang	41 orang	1 tahun	71 orang/bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	50 orang/bulan	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	2 dokumen					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhirtahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akg=hir tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	3 dokumen	16 Laporan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	16 Laporan	
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	2 dokumen	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>82 Orang</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80 Orang</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas pegawai	3 Paket	3 Paket	4 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	3 Paket	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	34 Orang	34 Orang	44 Orang	10 orang	44 Orang	44 Orang	44 Orang	85 orang	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	-	-	-	78 orang	-	-	-	85 orang	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>113 unit</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>111 unit</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	4 paket	4 paket	5 komponen	1 paket	5 komponen	5 komponen	5 komponen	1 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 paket	6 paket	6 item	6 paket	6 item	6 item	6 item	6 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	2 paket	2 paket	26 item	2 paket	26 item	26 item	26 item	2 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	84 dokumen	84 dokumen	300 eksemplar	96 dokumen	300 eksemplar	300 eksemplar	300 eksemplar	96 dokumen	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1 laporan	1 laporan	75 orang	1 laporan	75 orang	75 orang	75 orang	1 laporan	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen rapat koordinasi daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	1 dokumen	3 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 laporan	
	Penatausahaan arsip dinasmis pda SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinasmis pda SKPD	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusn pemerintah daerah</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>90%</b>	<b>33 unit</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>	<b>90%</b>	<b>32 unit</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	25 unit	25 unit	5 unit	30 unit	5 unit	5 unit	5 unit	30 unit	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasionalatau lapangan yang disediakan	-	-	.-	1 unit	.-	.-	.-	1 unit	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>62%</b>	<b>4 jenis jasa</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>	<b>4 jenis jasa</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa surat menyurat yang tersedia	1 laporan	1 laporan	600 eksemplar	1 laporan	800 eksemplar	800 eksemplar	600 eksemplar	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	1 laporan	1 laporan	1 tahun	1 laporan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	1 laporan	1 laporan	4 unit	1 laporan	4 unit	4 unit	4 unit	1 laporan	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>12 unit</b>	<b>87 unit</b>	<b>11 unit</b>	<b>11 unit</b>	<b>12 unit</b>	<b>86 unit</b>	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang tersedia	15 paket	15 paket	15 unit	24 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	1 unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	-	-	-	60 unit	-	-	-	-	24 unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	1 tahun	1 tahun	6 ruang	1 unit	6 ruang	6 ruang	6 ruang	6 ruang	1 unit	
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirasahaan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>300 orang</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>400 orang</b>	
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	<b>Penguatan lembaga PUG kewenangan provinsi</b>	-	-	<b>400 orang</b>	<b>10 Lembaga</b>	<b>400 orang</b>	<b>400 orang</b>	<b>400 orang</b>	<b>400 orang</b>	<b>10 Lembaga</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggara PUG tingkat provinsi	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM tingkat provinsi yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggara PUG	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	-	-	130 Orang	30 orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	-	

	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi</b>	<b>Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Jumlah Organisasi Masyarakat Menuju LPLPP</b>	-	-	<b>1 Lembaga</b>	<b>1 Lembaga</b>	<b>1 Lembaga</b>	<b>1 Lembaga</b>	<b>1 Lembaga</b>	<b>1 Lembaga</b>	
		<b>Pengembangan SDM Perempuan Bidang Politik dan hukum</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi masyarakat/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-	-	430 Peserta	300 orango	190 Peserta	190 Peserta	430 Peserta	450 orang	
		Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dan bidang politik hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi masyarakat/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 organisasi	10 organisasi	-	2 lembaga	-	-	-	2 lembaga	-

		Jumlah organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi kepada organisasi masyarakat di kab/kota	-	-	2 lembaga	-	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	-	-
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirasahaan</b>	-	-	<b>400 Orang</b>	<b>300 Orang</b>	<b>400 Orang</b>	<b>400 Orang</b>	<b>400 Orang</b>	<b>300 Orang</b>	-
		Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 lembaga	10 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	-	-	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	-
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	-	-	500 peserta	100 orang	500 peserta	500 peserta	500 peserta	300 orang	-

		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 orang	100 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</b>	-	-	<b>23,46 %</b>	<b>24,96 %</b>	<b>23,46 %</b>	<b>23,46 %</b>	<b>23,46 %</b>	<b>23,24 %</b>	-
		<b>Kebijakan Perlindungan Perempuan</b>	<b>2 Kebijakan</b>	<b>2 Kebijakan</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan</b>	-	-	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	-
		jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	3 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	-

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	10 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	-
		Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan lintas Daerah Kab/Kota	10 layanan	10 layanan	-	-	-	-	-	-	-
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu</b>	-	-	75%	50 layanan	75%	75%	75%	80%	-
		jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	80 orang	80 orang	30 orang	300 Orang	30 orang	30 orang	30 orang	40 Orang	-

	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Melaksanakan penguatan dan pengembangan bagi SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi</b>	-	-	-	60 orang	-	-	-	-	-
		peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada unit penyedia layanan	15 orang	15 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	15 orang	15 orang	-	60 orang	-	-	-	-	-
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Predikat kabupaten/kota layak anak</b>	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	-
		<b>Penguatan Pemenuhan Hak Anak</b>	3 Kebijakan	3 Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan pelembagaan PHA</b>	-	-	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	-
		Penguatan pelembagaan PHA	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	-	-	-	3 perangkat daerah	-	-	-	30 perangkat daerah	-



		Jumlah dokumen KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-
		Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak</b>	-	-	<b>4,07 %</b>	<b>3,88%</b>	<b>4,07 %</b>	<b>4,07 %</b>	<b>4,07 %</b>	<b>3,88%</b>	-
		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan</b>	-	-	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	-
		<b>dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	-

	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	-	-	75 layanan	50 layanan	75 layanan	75 layanan	75 layanan	80 layanan	-
		<b>jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi</b>	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	-	-	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	40 orang	-
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	-	-	30 orang	50 layanan	30 orang	30 orang	30 orang	50 orang	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase Capaian Data Gender dan anak</b>	-	-	75%	80%	75%	75%	75%	80%	-

		Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	75%	75%	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	-	-	20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	
		Capaian Data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah	75%	75%	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender Provinsi yang Tersedia	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Data anak Provinsi yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	--	--	2 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										
	<b>BIDANG FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	-	-	70%	80%	70%	70%	70%	80%	-

		<b>Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk</b>	<b>6 Kebijakan</b>	<b>6 Kebijakan</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota Se-Kaltim</b>	<b>1 kebijakan</b>	<b>1 kebijakan</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Penyelenggaraan pendafataran kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk</b>	-	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	-
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	-	-	1 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
	<b>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk</b>	<b>jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk</b>	-	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	-
	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
	Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	jumlah laporan hasil bimbingan teknis pendaftaran penduduk	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>			<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	-
		<b>Kebijakan terkait pencatatan sipil</b>	<b>6 Kebijakan</b>	<b>6 Kebijakan</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	-	-	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	-
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah kebijakan teknis di bidang catatan sipil yang telah ditetapkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-

		Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	6 Dokumen	6 Dokumen	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
	<b>Pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	<b>jumlah dokumen Pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	-	-	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>-</b>
	Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
	Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Publikasi data kependudukan skala provinsi</b>	-	-	<b>2 kali</b>	<b>2 kali</b>	<b>2 kali</b>	<b>2 kali</b>	<b>2 kali</b>	<b>2 kali</b>	<b>-</b>
		<b>Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan</b>	<b>5 Kebijakan</b>	<b>5 Kebijakan</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah data kependudukan</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan</b>	-	-	<b>27%</b>	<b>28%</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>	<b>28%</b>	<b>-</b>



	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Angka kelahiran total	-	-	2,10%	60 %	2,10%	2,10%	2,10%	55 %	-
		Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 Kebijakan	1 Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	-	5 sektor	5 sektor	5 sektor	5 sektor	5 sektor	5 sektor	-
		kebijakan tentang pengendalian penduduk	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		Jumlah dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	3 laporan	3 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	-	-	1 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-

	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Angka prevalensi kontrasepsi modern</b>	-	-	<b>67,98%</b>	<b>68,42 %</b>	<b>67,98%</b>	<b>67,98%</b>	<b>67,98%</b>	<b>68,42 %</b>	-
		<b>Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Ratio akseptor KB</b>	-	-	<b>0,76 %</b>	<b>0,76 %</b>	<b>0,76 %</b>	<b>0,76 %</b>	<b>0,76 %</b>	<b>0,76 %</b>	-
		<b>Peningkatan jumlah peserta KB</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-

	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	-	-	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	-
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	-	-	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	-
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Peningkatan SDM ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Indeks pembangunan keluarga (IBANGGA)</b>	-	-	<b>63,64 indeks</b>	<b>65,54 indeks</b>	<b>63,64 indeks</b>	<b>63,64 indeks</b>	<b>63,64 indeks</b>	<b>65,54 indeks</b>	-





Pada Tabel di atas, dapat kita cermati bahwa ada 1 (satu) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026 yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2025 IDG ditargetkan sebesar 67.31 dan realisasi tahun 2022 sebesar 66.89 tingkat capaian sebesar 103,50%. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik RI.

Ketimpangan gender di Kalimantan Timur masih terjadi. Hal ini tergambar dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih rendah. Secara khusus bila membahas peran perempuan dalam pembangunan, maka indikator IDG Kalimantan Timur masih rendah bila dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan dan berada di bawah IDG nasional. Hal ini menunjukkan Kaltim masih terjadi ketimpangan/ ketidaksetaraan gender pada partisipasi perempuan dalam pembangunan. Untuk itu perlu perhatian yang besar untuk peningkatan kualitas hidup perempuan sehingga dapat berdaya dan produktif.

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### 2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat daerah

#### a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih belum terpenuhinya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak serta belum setaranya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, permasalahan ini yang lebih dikenal dengan sebutan 3 M yaitu (1) akhiri kesenjangan Ekonomi, Politik dan pengambilan keputusan perempuan, (2) akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan (3) akhiri perdagangan orang.

#### b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahannya adalah masih rendahnya minat akseptor KB metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang responsif gender, tingginya angka perkawinan usia anak dan masih banyaknya usia remaja (sekolah) yang belum mendapatkan

fasilitasi pengembangan kualitas diri melalui wadah/forum PIK R dan BKR.

c. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sampai saat ini permasalahan yang timbul adalah masih kurangnya kesadaran/pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen dan belum optimalnya pelaksanaan KTP-El, serta belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan

2.3.2 Dampak terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/intenasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program untuk bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG).
2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, proporsi keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Kurangnya Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan urusan dalam tahapan pembangunan
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan angka kemiskinan perempuan yang

cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender

- Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan
- Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak
- Belum terintegrasi sistem data gender dan anak antar kabupaten kota
- Meningkatnya kualitas kesehatan perempuan yang ditandai dengan tingginya Angka Harapan Hidup perlu disertai dengan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan sosial

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Pengalaman bekerjasama dengan lembaga internasional cukup besar
- Beberapa kebijakan strategis dari Kementrian KPPPA turut memperkuat pencapaian kinerja DKP3A Provinsi Kalimantan timur
- Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah
- Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
- Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan

Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030)

- Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak
- Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak
- Menguatnya dukungan swasta dalam percepatan pencapaian hak-hak anak
- Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk memperkuat jaringan kelembagaan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan gender dan pemenuhan hak-hak anak

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman.
- Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- Kurangnya pengembangan kompetensi ASN disebabkan oleh terbatasnya diklat yang tersedia, diklat yang ada hanya pada kegiatan teknis tertentu.
- Adanya Mutasi Pegawai pada bidang teknis menghambat proses pelayanan.
- Belum optimalnya penggunaan SOP dalam pelayanan internal sehingga berpengaruh terhadap layanan publik.
- Dalam capaian kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.
- Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suami/anak laki-lakinya.
- Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.

c. Permasalahan Perlindungan Hak Perempuan:

- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
  - ✓ Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi tidak optimal karena terdapat kasus yang tidak dilaporkan, masyarakat masih enggan melaporkan karena menanggung aib keluarga, atau karena tidak mengetahui lembaga layanan.
  - ✓ Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas
  - ✓ Belum tersedianya data perempuan tenaga kerja korban kekerasan
  - ✓ Belum optimalnya pencatatan laporan data kekerasan melalui aplikasi simfoni dikarenakan mutasi pegawai/tenaga teknis.
- Perempuan sangat rentan terhadap pornografi dan kekerasan.
- Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.

- Belum optimalnya peran lembaga pemerhati perempuan dalam pemenuhan perlindungan hak perempuan.

d. Permasalahan Perlindungan Anak:

- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
- Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
- Angka anak Putus sekolah yang cukup tinggi.
- Belum sepenuhnya sistem perlindungan di provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan baik.

e. Permasalahan Tumbuh Kembang Anak:

- Belum semua anak memiliki akte kelahiran.
- Masih tingginya anak yang belum memiliki kartu identitas anak.
- Kurangnya pengetahuan / informasi tentang pengasuhan dan pembinaan keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anak korban kekerasan.
- Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
- Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
- Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.

f. Permasalahan Sistem Informasi Gender dan Anak.

- Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan tidak terbaru
- Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak

- Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan anak.
  - Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak
  - Belum semua wilayah Kalimantan Timur dengan mudah mengakses internet untuk penggunaan aplikasi Simfoni PPPA.
- g. Permasalahan Pengendalian Penduduk dan KB
- Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh kompetensi rawan menjadi kelompok marjinal.
  - Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan.
  - Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga
  - Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB
  - Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia pernikahan pertama belum optimal.
- h. Permasalahan terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Kurang optimalnya fungsi organisasi / lembaga penyedia data dalam penyediaan data terpilah atau data gender.
  - Belum tersedianya jaringan yang memadai untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan.
  - Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Kependudukan,

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender difokuskan pada:

- Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan;
- Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
- Meningkatkan kualitas SDM aparaturnya perlindungan anak dan perempuan

Analisa Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) dari berbagai kegiatan yang terdapat dalam rincian kegiatan APBD Tahun 2023 secara umum berhasil diselesaikan, tetapi program dan kegiatan terlaksana sepenuhnya dengan beberapa hal yang menjadi hambatan realisasi anggaran sebagaimana tersebut diatas. Nilai rata-rata pencapaian realisasi fisik 95%. Sedangkan Analisa pencapaian sasaran strategis dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai sasaran
- Meningkatnya kualitas hidup perempuan sasaran
- Meningkatnya implementasi PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi
- Meningkatnya Kualitas Hidup keluarga
- Meningkatnya implementasi Kabupaten/ Kota menuju layak anak
- Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate dengan sasaran

#### 2.4.1 Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

Perencanaan yang baik membutuhkan perhatian yang jeli terhadap perkembangan yang terus berubah. Akibatnya, penyesuaian rencana kerja patut dilakukan guna memastikan visi dan misi organisasi tercapai. Karena itu, DKP3A melakukan berbagai perbaikan perencanaan melalui peninjauan kembali rencana awal yang telah dibuat.

#### 2.4.2 Alasan Perbandingan tersebut dilaksanakan

Selanjutnya kesenjangan kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi tolok ukur kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pagu pada setiap program/ kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhannya, sehingga Perangkat Daerah dapat menjalankan program dan kegiatannya dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien

2.4.3 Temuan dan catatan penting jika terdapat perbedaan dengan rancangan RKPD seperti rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD termasuk perbedaan besaran anggaran dan kinerja. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan timur pada tahun 2023 tidak terdapat temuan atau catatan penting terhadap rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan DPA

Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025  
Provinsi Kalimantan Timur

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NON URUSAN				26.494.666.928	NON URUSAN				26.494.666.928
	[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 indeks	26.494.666.928	[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 indeks	26.494.666.928
								Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	
	[ KEGIATAN ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,50 %	994.815.101	[ KEGIATAN ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,50 %	994.815.101
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	126.560.000	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	126.560.000

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	175.597.068	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	175.597.068
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	8.000.000	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	8.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8.000.000	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	8.000.000	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	8.000.000

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 laporan	166.999.610	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 laporan	166.999.610
	[ SUB KEGIATAN ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	286.549.943	[ SUB KEGIATAN ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	286.549.943
	(SUB KEGIATAN) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penhusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penhusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	215.108.480	(SUB KEGIATAN) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penhusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penhusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	215.108.480
	[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat	Prov. Kaltim	Persentase realisasi anggaran	94.50%	16.585.614.124	[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan	Prov. Kaltim	Persentase realisasi anggaran	94.50%	16.585.614.124

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Daerah</b>					<b>Perangkat Daerah</b>				
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang/bulan	16.116.374.1 24	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang/bulan	16.116.374.12 4
	(SUB KEGIATAN) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	281.240.000	(SUB KEGIATAN) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	281.240.000
	(SUB KEGIATAN) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasni SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasni SKPD	12 dokumen	40.000.000	(SUB KEGIATAN) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasni SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasni SKPD	12 dokumen	40.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	30.000.000	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	30.000.000

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	59.000.000	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	59.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	79.000.000	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	79.000.000
	[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	<b>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>82 orang</b>	<b>967.428.861</b>	[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	<b>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>82 orang</b>	<b>967.428.861</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	284.373.000	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	284.373.000

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kelengkapannya				
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78 orang	526.627.901	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78 orang	526.627.901
	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	176,428.960	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	176,428.960
	[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>113 unit</b>	<b>2.612.085.937</b>	[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>113 unit</b>	<b>2.612.085.937</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.478.425	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.478.425

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	57.186.964	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	57.186.964
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	853.471.714	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	853.471.714
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	96 dokumen	16.791.800	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	96 dokumen	16.791.800
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	68.352.922	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	68.352.922
	[ SUB KEGIATAN ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 laporan	1.481.172.312	[ SUB KEGIATAN ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	1.481.172.312

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SKPD			SKPD				
	[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	110.632.000	[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	110.632.000
	<b>[ KEGIATAN ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusn pemerintah daerah</b>	<b>33 unit</b>	<b>1.648.365.310</b>	<b>[ KEGIATAN ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusn pemerintah daerah</b>	<b>33 unit</b>	<b>1.648.365.310</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	581.662.000	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	581.662.000
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Meubel	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Meubel	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	1.067.703.310	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	1.067.703.310
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Aset Tak	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang	-	-	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Aset	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang	-	-

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Berwujud		Disediakan			Tak Berwujud		Disediakan		
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>4 jenis jasa</b>	<b>3.066.180.176</b>	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>4 jenis jasa</b>	<b>3.066.180.176</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.902.000	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.902.000
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	809.162.200	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	809.162.200
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	9.360.000	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	9.360.000

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	2.236.715.976	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	2.236.715.976
	<b>[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>87 unit</b>	<b>5999.196.419</b>	<b>[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>87 unit</b>	<b>5999.196.419</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	56.004.999	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	56.004.999
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	24 unit	288.665.420	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	288.665.420

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lapangan		dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	94.332.000	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	94.332.000
	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	160.204.000	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	160.204.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	Prov. Kaltim			18.259.296.000	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	Prov. Kaltim			18.259.296.000
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan</b>	<b>300 orang</b>	<b>2.537.267.258</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas</b>	<b>300 orang</b>	<b>2.537.267.258</b>

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>kapasitas dalam kewirausahaan</b>			<b>DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>dalam kewirausahaan</b>		
	<b>[ KEGIATAN ] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>563.730.648</b>	<b>[ KEGIATAN ] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>563.730.648</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 laporan	337.599.560	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 laporan	337.599.560
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 dokumen	126.131.500	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 dokumen	126.131.500
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan	30 orang	99.999.588	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan	Prov. Kaltim	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	30 orang	99.999.588

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PUG tingkat Provinsi			PUG Kewenangan Provinsi				
	<b>[ KEGIATAN ] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>658.937.430</b>	<b>[ KEGIATAN ] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>658.937.430</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	200 orang	260.999.568	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	200 orang	260.999.568

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 lembaga	397.337.862	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 lembaga	397.337.862
	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</b>	<b>300 orang</b>	<b>1.304.599.180</b>	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</b>	<b>300 orang</b>	<b>1.304.599.180</b>
	[ SUB KEGIATAN ]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Prov. Kaltim	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran	1 lembaga	139.040.455	[ SUB KEGIATAN ]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Prov. Kaltim	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi	1 lembaga	139.040.455

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kewenangan Provinsi		Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi			Perempuan Kewenangan Provinsi		tingkat Provinsi		
	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	100 orang	999.559.157	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	100 orang	999.559.157
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 unit	165.999.568	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 unit	165.999.568

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</b>	<b>24,96%</b>	<b>3.066.626.1 88</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</b>	<b>24,96%</b>	<b>3.066.626.18 8</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prov. Kaltim	<b>Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>1.596.900.0 00</b>	<b>[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prov. Kaltim	<b>Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>1.596.900.00 0</b>
	<b>[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	829.500.000	<b>[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	829.500.000

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	20 Perangkat Daerah	767.400.000	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	20 Perangkat Daerah	767.400.000
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prov. Kaltim	<b>Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupatenkota</b>	<b>60 layanan</b>	<b>1.111.658.820</b>	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prov. Kaltim	<b>Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupatenkota</b>	<b>60 layanan</b>	<b>1.111.658.820</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	30 orang	858.280.000	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 orang	858.280.000

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Layanan Pengaduan Masyarakat			Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 layanan	243.378.820	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 layanan	243.378.820
	<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Melaksanakan penguatan an pengembangan bagi SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi</b>	<b>60 orang</b>	<b>358.067.366</b>	<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Melaksanakan penguatan an pengembangan bagi SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi</b>	<b>60 orang</b>	<b>358.067.366</b>

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(SUB KEGIATAN) Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	60 orang	358.067.366	(SUB KEGIATAN) Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	60 orang	358.067.366
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Predikat kabupaten/kota layak anak</b>	<b>90%</b>	<b>1.592.98.889</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Predikat kabupaten/kota layak anak</b>	<b>90%</b>	<b>1.592.98.889</b>
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>JJumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>634.899.068</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>JJumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>634.899.068</b>

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	3 perangkat daerah	330.999.529	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	3 perangkat daerah	330.999.529
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	303.899.539	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	303.899.539
	[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Prov. Kaltim	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	957.999.821	[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Prov. Kaltim	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	957.999.821

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Kewenangan Provinsi</b>					<b>Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>				
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Prov. Kaltim	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	3 kegiatan	393.999.911	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Prov. Kaltim	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	3 kegiatan	393.999.911
	[ SUB KEGIATAN ] Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	563.999.910	[ SUB KEGIATAN ] Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	563.999.910

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prov. Kaltim	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	3,88%	2.780.495.074	[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prov. Kaltim	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	3,88%	2.780.495.074
	[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	1.600.000.000	[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	1.600.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	900.000.000	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	900.000.000
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan provinsi	1 kebijakan	700.000.000	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan provinsi	1 kebijakan	700.000.000

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	50 layanan	314.018.484	[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	50 layanan	314.018.484
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30 orang	1732.716.590	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30 orang	1732.716.590
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	50 layanan	314.018.484	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	50 layanan	314.018.484

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 dokumen	693.760.000	[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 dokumen	693.760.000
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	693.760.000	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	693.760.000

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Capaian Data Gender dan anak</b>	<b>80%</b>	<b>1.006.499.4 54</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Capaian Data Gender dan anak</b>	<b>80%</b>	<b>1.006.499.45 4</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</b>	<b>20 data</b>	<b>1.006.499.4 54</b>	<b>[ KEGIATAN ] Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</b>	<b>20 data</b>	<b>1.006.499.45 4</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	4 dokumen	505..249.714	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	4 dokumen	505..249.714
	[ SUB KEGIATAN ] Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 dokumen	501.249.740	[ SUB KEGIATAN ] Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 dokumen	501.249.740

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	Prov. Kaltim			1.708.118.000	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	Prov. Kaltim			1.708.118.000
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk</b>	<b>80%</b>	<b>705.455.220</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk</b>	<b>80%</b>	<b>705.455.220</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>550.712.216</b>	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>550.712.216</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3 laporan	481.805.112	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3 laporan	481.805.112
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 laporan	88.907.1040	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 laporan	88.907.1040

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>[ KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>154.743.004</b>	<b>[ KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>154.743.004</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 laporan	82.913.300	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 laporan	82.913.300
	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 laporan	71.829.704	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 laporan	71.829.704
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	<b>100%</b>	<b>724.664.040</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	<b>100%</b>	<b>724.664.040</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>380.172.620</b>	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>380.172.620</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 laporan	297.004.620	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 laporan	297.004.620

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	83.168.000	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	83.168.000
	<b>[ KEGIATAN ] Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>344,491.440</b>	<b>[ KEGIATAN ] Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>344,491.440</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	88.920.000	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	88.920.000
	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	255.571.440	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	255.571.440
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Prov. Kaltim	<b>Publikasi data kependudukan skala provinsi</b>	<b>2 kali</b>	<b>500.594.593</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Prov. Kaltim	<b>Publikasi data kependudukan skala provinsi</b>	<b>2 kali</b>	<b>500.594.593</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan</b>	<b>27%</b>	<b>309.785.413</b>	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan</b>	<b>27%</b>	<b>309.785.413</b>

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Kependudukan</b>					<b>Kependudukan</b>				
	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	81.644.927	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	81.644.927
	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	36.124.496	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	36.124.496
	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	3 dokumen	192.014.990	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	3 dokumen	192.014.990
	[ KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>190.809.180</b>	[ KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>190.809.180</b>

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	37.760.000	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	37.760.000
	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	40 orang	153.048.180	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	40 orang	153.048.180

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	Prov. Kaltim			2.368.437.338	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	Prov. Kaltim			2.368.437.338
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Prov. Kaltim	<b>Angka kelahiran total</b>	<b>60%</b>	<b>607.890.3285</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Prov. Kaltim	<b>Angka kelahiran total</b>	<b>60%</b>	<b>607.890.3285</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</b>	<b>5 sektor</b>	<b>607.990.285</b>	<b>[ KEGIATAN ] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</b>	<b>5 sektor</b>	<b>607.990.285</b>
	<b>[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi GDPK</b>	Prov. Kaltim	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 laporan	277.901.588	<b>[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi GDPK</b>	Prov. Kaltim	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 laporan	277.901.588

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	2 laporan	329.888.697	[ SUB KEGIATAN ] Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SK dan Pojok Kependudukan/PJK	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	2 laporan	329.888.697
	[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prov. Kaltim	<b>Angka prevalensi kontrasepsi modern</b>	<b>68,42%</b>	<b>641.647.945</b>	[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prov. Kaltim	<b>Angka prevalensi kontrasepsi modern</b>	<b>68,42%</b>	<b>641.647.945</b>
	[ KEGIATAN ] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	Prov. Kaltim	<b>Ratio akseptor KB</b>	<b>0.76%</b>	<b>641.647.945</b>	[ KEGIATAN ] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	Prov. Kaltim	<b>Ratio akseptor KB</b>	<b>0.76%</b>	<b>641.647.945</b>

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>					<b>Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>				
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Prov. Kaltim	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 daerah	170.648.542	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Prov. Kaltim	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 daerah	170.648.542
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	370.999.800	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	370.999.800

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	99.999.613	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	99.999.613
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Prov. Kaltim	<b>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</b>	<b>65,54 %</b>	<b>1.118.899.108</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Prov. Kaltim	<b>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</b>	<b>65,54 %</b>	<b>1.118.899.108</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	<b>4 organisasi</b>	<b>1.118.899.109</b>	<b>[ KEGIATAN ] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	<b>4 organisasi</b>	<b>1.118.899.109</b>

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	920.900.000	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	920.900.000
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Prov. Kaltim	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	2 organisasi	98.999.552	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Prov. Kaltim	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	2 organisasi	98.999.552
	[ KEGIATAN ] <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga</b>	<b>40%</b>	<b>98.999.552</b>	[ KEGIATAN ] <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga</b>	<b>40%</b>	<b>98.999.552</b>

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 laporan	<b>98.999.552</b>	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 laporan	<b>98.999.552</b>
					<b>41.767.605.000</b>					<b>41.767.605.000</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### 2.5.1 Proses pengusulan oleh pemangku kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

DKP3A Provinsi Kalimantan Timur membangun Partisipasi masyarakat dalam urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui penerbitan rekomendasi hasil telaahan program dan kegiatan masyarakat, meliputi :

1. Badan kerja sama organisasi wanita (BKOW) Provi. Kaltim
2. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Cabang Kalimantan Timur
3. Dharma Wanita Persatuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

### 2.5.1 Kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota memiliki kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur .Adapun yang menjadi isu penting dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, hal ini sejalan dan sesuai dengan usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dan Perlindungan Khusus Anak, Perlindungan Perempuan dan Administrasi Kependudukan.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025  
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Kalimantan Timur

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>NON URUSAN</b>				
	[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 indeks	
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	
	[ KEGIATAN ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71%	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	
	( SUB KEGIATAN ) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	
	[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase realisasi anggaran	94.50%	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang/bulan	
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dokumen	
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	
	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>82 orang</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78 orang	
	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	
	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>113 unit</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 dokumen	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	
	<b>[ KEGIATAN ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>33 unit</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>4 jenis</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	
	<b>[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>87 unit</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	
	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	Prov. Kaltim			
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</b>	<b>300 orang</b>	
	<b>[ KEGIATAN ] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi</b>	<b>10 lembaga</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 dokumen	
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	30 orang	
	<b>[ KEGIATAN ] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah organisasi masyarakat menuju LPLPP</b>	<b>1 lembaga</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah pengelola organisasi masyarakat/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	200 orang	
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah organisasi masyarakat/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 lembaga	
	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</b>	<b>300 orang</b>	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
	[ SUB KEGIATAN ]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 lembaga	
	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	100 orang	
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 unit	
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</b>	<b>24.96%</b>	
	<b>[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prov. Kaltim	<b>Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan</b>	<b>10 lembaga</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	20 Perangkat Daerah	
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prov. Kaltim	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu</b>	<b>80%</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	40 orang	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 layanan	
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Prov. Kaltim	<b>Predikat kabupaten/kota layak anak</b>	<b>90%</b>	
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA</b>	<b>10 lembaga</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	3 perangkat daerah	
	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak</b>	<b>10 lembaga</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Prov. Kaltim	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	3 kegiatan	
	[ SUB KEGIATAN ] Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak</b>	<b>3.88%</b>	
	<b>[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan</b>	<b>1 lembaga</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	<b>80 layanan</b>	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	40 orang	
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	50 layanan	
	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak</b>	<b>1 dokumen</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Capaian Data Gender dan anak</b>	<b>80%</b>	
	<b>[ KEGIATAN ] Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</b>	<b>20 data</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	4 dokumen	
	[ SUB KEGIATAN ] Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	6 dokumen	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	Prov. Kaltim			
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk</b>	<b>80%</b>	
	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk</b>	<b>1 dokumen</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 laporan	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>[ KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1 dokumen</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 laporan	
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	<b>100%</b>	
	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	<b>2 dokumen</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	
	<b>[ KEGIATAN ] Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>2 dokumen</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Prov. Kaltim	<b>Publikasi data kependudukan skala provinsi</b>	<b>2 kali</b>	
	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan</b>	<b>28%</b>	
	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	
	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	
	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	3 dokumen	
	<b>[ KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>1 dokumen</b>	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	
	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	60 orang	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	Prov. Kaltim			
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Prov. Kaltim	<b>Angka kelahiran total</b>	<b>2.10%</b>	
	<b>[ KEGIATAN ] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</b>	<b>5 sektor</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Prov. Kaltim	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 laporan	
	[ SUB KEGIATAN ] Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 laporan	
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Prov. Kaltim	<b>Angka prevalensi kontrasepsi modern</b>	<b>68.42%</b>	
	<b>[ KEGIATAN ] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Prov. Kaltim	<b>Ratio akseptor KB</b>	<b>0.76%</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Prov. Kaltim	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 daerah	
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Prov. Kaltim	<b>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</b>	<b>65,54% indeks</b>	
	<b>[ KEGIATAN ] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	<b>4 organisasi</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Prov. Kaltim	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	2 organisasi	
	<b>[ KEGIATAN ] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga</b>	<b>40%</b>	
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 laporan	

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Selanjutnya, pelaksanaan program pembangunan melalui program-program prioritas Kalimantan Timur tahun 2025 juga dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas Nasional.

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD Tahun 2024-2026 dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, telah diusulkan pada prioritas nasional 3 yaitu :

**“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”**

dan untuk mendukung program prioritas tersebut maka diusulkan program DKP3A Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

**“Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan”**

Selain itu dilakukan beberapa telaahan kebijakan nasional terkait dengan capaian kinerja Kementerian sebagai kebijakan nasional, meliputi:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Penelaahan ini dilaksanakan melalui penyelarasan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026.

#### **3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun 2025-2026. Tujuan disesuaikan dengan 3 (tiga) urusan yang diampu DKP3A Prov. Kaltim melalui 6 (enam) tujuan meliputi:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

2. Meningkatkan Daya Saing Perempuan
3. Meningkatkan Upaya perlindungan hak Perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur
4. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
5. Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun Sasaran yang ditetapkan meliputi :

1. Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak
2. Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi
3. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim
4. Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak
5. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana
6. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan

Tabel 3.1

## Tujuan dan Sasaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	97
		Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Poin	70.50
2	Meningkatkan Daya Saing Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	67,31
		Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)	Lembaga PEKKA	2
			Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	300
3	Meningkatkan Upaya perlindungan hak Perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur		Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0.030
		Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	23.24
4	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas		Persentase Peningkatan ketersediaan data gender dan anak	%	80
		Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	%	80
5	Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana		Angka Kelahiran Total (Total Fertility/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	%	55
		Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.53

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		Persentase Kepemilikan KTP-el se Kaltim	%	99.4
			Persentase Kepemilikan KIA se Kaltim	%	60
			Persentase Kepemilikan Akta Kel Anak se Kaltim	%	98,5
		Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100

### 3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

Dengan memperhatikan Visi Gubernur Kalimantan Timur “Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat “ dan Misi Pembangunan Gubernur Kalimantan Timur butir kesatu yaitu “Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya manusia yang berahlak mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas” maka disusunlah program dan kegiatan pada DKP3A Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada tujuan pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terkait pencapaian kesetaraan gender dan pengurangan kesenjangan secara konkrit terlihat pada kegiatan :

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

1.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan Kegiatan DKP3A Tahun 2023 memiliki 13 Program dan 25 Kegiatan dan 56 Sub kegiatan. dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Program Internal seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan hanya terfokus di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur sedangkan untuk Program Eksternal lokasi tempat pelaksanaan kegiatan tersebar di Provinsi dan Kabupaten Kota.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2022 berdasarkan RKPD sebesar Rp. 20.270.213.568,- yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.

### 1.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

Secara umum Rancangan RKPD telah sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Kesesuaian tersebut dilihat dalam uraian program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target dan pagu indikatif yang mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel T-C.33

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

## Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan timur

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>NON URUSAN</b>				<b>26.494.666.928</b>				<b>24.311.610.396</b>
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>		<b>84 indeks</b>	<b>26.494.666.928</b>			<b>84 indeks</b>	<b>24.311.610.396</b>
		<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</b>		<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
	<b>[ KEGIATAN ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>71,00%</b>	<b>994.815.101</b>	<b>APBD</b>		<b>71,50%</b>	<b>911.500.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	6 dokumen	126.560.000	APBD		3 dokumen	129.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	2 dokumen	175.597.068	APBD		2 dokumen	133.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Kaltim	1 dokumen	8.000.000	APBD		1 dokumen	10.500.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prov. Kaltim	1 dokumen	8.000.000	APBD		1 dokumen	10.500.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Prov. Kaltim	1 dokumen	8.000.000	APBD		1 dokumen	10.500.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	23 laporan	166.999.610	APBD		3 laporan	168.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	1 laporan	286.549.943	APBD		1 laporan	288.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Prov. Kaltim	2 Berita Acara	215.108.480	APBD		-	162.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah							
	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>94.50%</b>	<b>16.585.614.124</b>	APBD		<b>95%</b>	<b>12.648.110.396</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	71 orang/bulan	16.116.374.124,00	APBD		45 orang/bulan	12.548.110.396
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	2 dokumen	261.240.000,00	APBD		1 dokumen	-
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prov. Kaltim	12 dokumen	40.000.000,00	APBD		12 dokumen	-
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	1 laporan	30.000.000,00	APBD		1 laporan	45.000.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	18 laporan	59.000.000,00	APBD		18 laporan	35.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	2 dokumen	79.000.000,00	APBD		2 dokumen	20.000.000
	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>82 orang</b>	<b>987.429.861</b>	<b>APBD</b>		<b>86 Orang</b>	<b>1.300.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Prov. Kaltim	3 paket	284.373.000,00	APBD		3 paket	400.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kaltim	78 orang	526.627.901	APBD		85 orang	700.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kaltim	10 orang	176,428,960,00	APBD		12 orang	200.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>113 unit</b>	<b>2.612.085.937</b>	<b>APBD</b>		<b>117 unit</b>	<b>3.656.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 paket	25.478.425,00	APBD		1 paket	60.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	6 paket	57.186.964,00	APBD		6 paket	300.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Kaltim	2 paket	853.471.714,00	APBD		2 paket	200.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Prov. Kaltim	96 dokumen	15.791.600,00	APBD		96 dokumen	16.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kaltim	1 laporan	68.352.922,00	APBD		1 laporan	400.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	3 laporan	1.481.172.312,00	APBD		3 laporan	2.480.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Kaltim	1 dokumen	110.632.000,00	APBD		1 dokumen	200.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>33 unit</b>	<b>1.649.365.310,00</b>	<b>APBD</b>		<b>34 Unit</b>	<b>1.684.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 unit	581.662.000,00	APBD		1 unit	784.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov. Kaltim	30 unit	1.067.703.310,00	APBD		30 unit	900.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>4 jenis jasa</b>	<b>3.066.160.176,00</b>	<b>APBD</b>		<b>4 jenis jasa</b>	<b>3.227.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	1 laporan	10.902.000,00	APBD		1 laporan	17.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 laporan	809.182.200,00	APBD		1 laporan	700.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 laporan	9.360.000,00	APBD		1 laporan	110.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumbu r dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 laporan	2,236.715.976,00	APBD		1 laporan	2.400.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>87 unit</b>	<b>599.196.419,00</b>	<b>APBD</b>		<b>88 unit</b>	<b>885.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Prov. Kaltim	1 unit	56.004.999,00	APBD		1 unit	65.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prov. Kaltim	24 unit	288.655.420,00	APBD		25 unit	250.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Prov. Kaltim	60 unit	94.332.000,00	APBD		60 unit	70.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Kaltim	1 unit	160.204.000,00	APBD		1 unit	500.000.000,00
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		Prov. Kaltim		<b>10.019.921.260,00</b>	APBD			<b>10.730.000.000,00</b>
	[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</b>	Prov. Kaltim	<b>300 orang</b>	<b>2.527.267.258,00</b>	APBD		<b>300 orang</b>	<b>2.135.000.000,00</b>
	[ KEGIATAN ] Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	<b>Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>563.730.648,00</b>	<b>APBD</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>715.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Prov. Kaltim	1 laporan	337.599.560,00	APBD		1 laporan	465.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Prov. Kaltim	1 dokumen	126.131.500,00	APBD		1 dokumen	150.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Prov. Kaltim	30 orang	99.999.588,00	APBD		35 orang	100.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>658.937.430,00</b>	<b>APBD</b>			<b>500.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Prov. Kaltim	200 orang	260.999.568,00	APBD		450 orang	250.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumbu r dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Prov. Kaltim	1 lembaga	397.937.862,00	APBD		2 lembaga	250.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>300 orang</b>	<b>1.304.599.180,00</b>	<b>APBD</b>		<b>300 orang</b>	<b>920.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	Prov. Kaltim	1 lembaga	139.040.455,00	APBD		1 lembaga	150.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Prov. Kaltim	100 orang	999.559.157,00	APBD		300 orang	600.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	Prov. Kaltim	1 unit	165.999.568,00	APBD		1 unit	170.000.000,00
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>24.96%</b>	<b>3.066.626.186,00</b>	<b>APBD</b>		<b>24.96%</b>	<b>3.359.907.948,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>1.596.900.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>1.700.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 dokumen	829.500.000,00	APBD		3 dokumen	900.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	20 Perangkat Daerah	767.400.000,00	APBD		10 Perangkat Daerah	800.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>80 %</b>	<b>1.111.658.820,00</b>	<b>APBD</b>		<b>85%</b>	<b>1.259.907.948,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Prov. Kaltim	40 orang	868.280.000,00	APBD		40 orang	770.500.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	50 layanan	243.378.820,00	APBD		60 layanan	489.407.948,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>358.067.366,00</b>	<b>APBD</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>400.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Prov. Kaltim	60 Orang	358.067.366,00	APBD		60 Orang	400.000.000,00
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Predikat kabupaten/kota layak anak</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>90 %</b>	<b>1.592.898.889,00</b>	<b>APBD</b>		<b>90 %</b>	<b>1.800.000.000</b>
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelebagaan PHA</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>634.899.068</b>	<b>APBD</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>800.000.000,00</b>

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Prov. Kaltim	3 perangkat daerah	330.999.529	APBD		30 perangkat daerah	350.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 Dokumen	303.899.539	APBD		1 dokumen	450.000.000
	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>957.999.821</b>	<b>APBD</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Prov. Kaltim	1 kegiatan	393.999.911,00	APBD		1 kegiatan	400.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Prov. Kaltim	1 kegiatan	563.999.910,00	APBD		1 kegiatan	600.000.000,00
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>3.88%</b>	<b>2.780.495.074,00</b>	<b>APBD</b>		<b>3.88%</b>	<b>3.446.907.948,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Lembaga</b>	<b>1.800.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 dokumen	900.000.000,00	APBD		1 dokumen	900.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	Prov. Kaltim	1 Kebijakan	700.000.000,00	APBD		1 Dokumen	900.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumbu r dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>80 layanan</b>	<b>172.716.590</b>	<b>APBD</b>		<b>85 Layanan</b>	<b>357.500.000</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	30 orang	172.716.590,00	APBD		50 orang	357.500.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	80 Layanan	314.018.484,00	APBD		50 orang	489.407.948,00
	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>693.760.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>800.000.000,00</b>

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 dokumen	693.760.000,00	APBD		1 dokumen	800.000.000,00
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase Capaian Data Gender dan anak</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>80%</b>	<b>1.006.499.454,00</b>	<b>APBD</b>		<b>80%</b>	<b>1.150.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>20 data</b>	<b>1.006.499.454,00</b>	<b>APBD</b>		<b>20 data</b>	<b>1.150.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Prov. Kaltim	4 dokumen	505.249.714,00	APBD		2 dokumen	550.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Prov. Kaltim	6 dokumen	501.249.740,00	APBD		2 dokumen	600.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Prov. Kaltim</b>		<b>1.930.713.873,00</b>	<b>APBD</b>			<b>2.450.000.000,00</b>
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>80%</b>	<b>705.455.220,00</b>	<b>APBD</b>		<b>80 %</b>	<b>900.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>550.712.216,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>700.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	3 laporan	461.805.112,00	APBD		1 laporan	600.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	1 laporan	88.907.104,00	APBD		1 laporan	100.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>154.743.004,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	1 laporan	82.913.300,00	APBD		1 laporan	100.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis terkait	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait	Prov. Kaltim	1 laporan	71.829.704,00	APBD		1 laporan	100.000.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumbu r dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendaftaran Penduduk	Pendaftaran Penduduk							
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	Prov. Kaltim	<b>100%</b>	<b>724.664.060,00</b>	APBD			800.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>380.172.620,00</b>	<b>APBD</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>400.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	1 laporan	297.004.620,00	APBD		1 laporan	300.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	1 laporan	83.168.000,00	APBD		1 laporan	100.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>344.491.440,00</b>	<b>APBD</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>400.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	1 laporan	88.920.000,00	APBD		1 laporan	100.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	1 laporan	255.571.440,00	APBD		1 laporan	300.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Publikasi data kependudukan skala provinsi</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>2 kali</b>	<b>500.594.593,00</b>	<b>APBD</b>		<b>2 Kali</b>	<b>750.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>28 %</b>	<b>309.785.413,00</b>	<b>APBD</b>		<b>29%</b>	<b>500.000.000,00</b>
	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	1 laporan	81.644.927,00	APBD		1 laporan	200.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	1 laporan	36.125.496,00	APBD		1 laporan	100.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Prov. Kaltim	3 dokumen	192.014.990,00	APBD		1 dokumen	200.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>190.809.180,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>250.000.000,00</b>
	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	1 laporan	37.760.000,00	APBD		1 laporan	50.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Prov. Kaltim	60 orang	153.049.180,00	APBD		40 orang	200.000.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		<b>Prov. Kaltim</b>		<b>2.368.437.338,00</b>	<b>APBD</b>			<b>2.530.000.000,00</b>
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Angka kelahiran total</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>60%</b>	<b>607.890.285,00</b>	<b>APBD</b>		<b>60%</b>	<b>730.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>5 sektor</b>	<b>607.890.285,00</b>	<b>APBD</b>		<b>5 sektor</b>	<b>730.000.000,00</b>
	<b>[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi GDPK</b>	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Prov. Kaltim	3 laporan	277.901.588,00	APBD		1 laporan	300.000.000,00
	<b>[ SUB KEGIATAN ] Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Prov. Kaltim	2 laporan	329.998.697,00	APBD		1 laporan	430.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Angka prevalensi kontrasepsi modern</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>68.42%</b>	<b>641.647.945,00</b>	<b>APBD</b>		<b>68.42%</b>	<b>800.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Ratio akseptor KB</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>0.76%</b>	<b>641.647.945,00</b>	<b>APBD</b>		<b>0.76%</b>	<b>800.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Prov. Kaltim	1 daerah	170.648.532,00	APBD		1 daerah	300.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Prov. Kaltim	1 daerah	370.999.800,00	APBD		1 daerah	250.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Prov. Kaltim	1 dokumen	99.999.613,00	APBD		1 dokumen	250.000.000,00
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>65,54 indeks</b>	<b>1.118.899.108,00</b>	<b>APBD</b>		<b>65,54 indeks</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>4 organisasi</b>	<b>1.019.899.556,00</b>	<b>APBD</b>		<b>4 organisasi</b>	<b>850.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prov. Kaltim	1 dokumen	920.900.000,00	APBD		1 dokumen	700.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumbu r dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Prov. Kaltim	2 organisasi	98.999.556,00	APBD		1 organisasi	150.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>40%</b>	<b>98.999.552,00</b>	<b>APBD</b>		<b>40%</b>	<b>150.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Prov. Kaltim	1 laporan	98.999.552,00	APBD		1 laporan	150.000.000,00
					<b>41.767.605.000</b>				<b>41.183.426.292</b>

## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan rencana kerja tahun 2025 memuat indikator kinerja outcome/output masing-masing Program/kegiatan, serta perkiraan maju tahun anggaran 2026 pada DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD  
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Kalimantan Timur

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>NON URUSAN</b>				<b>26.494.666.928</b>				<b>24.311.610.396</b>
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>		<b>84 indeks</b>	<b>26.494.666.928</b>			<b>84 indeks</b>	<b>24.311.610.396</b>
		<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</b>		<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>71,00%</b>	<b>994.815.101</b>	<b>APBD</b>		<b>71,50%</b>	<b>911.500.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	6 dokumen	126.560.000	APBD		3 dokumen	129.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	2 dokumen	175.597.068	APBD		2 dokumen	133.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Kaltim	1 dokumen	8.000.000	APBD		1 dokumen	10.500.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prov. Kaltim	1 dokumen	8.000.000	APBD		1 dokumen	10.500.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Prov. Kaltim	1 dokumen	8.000.000	APBD		1 dokumen	10.500.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumbu r dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	23 laporan	166.999.610	APBD		3 laporan	168.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	1 laporan	286.549.943	APBD		1 laporan	288.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	2 Berita Acara	215.108.480	APBD		-	162.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>94.50%</b>	<b>16.585.614.124</b>	APBD		<b>95%</b>	<b>12.648.110.396</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	71 orang/bulan	16.116.374.124,00	APBD		45 orang/bulan	12.548.110.396

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	2 dokumen	261.240.000,00	APBD		1 dokumen	-
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prov. Kaltim	12 dokumen	40.000.000,00	APBD		12 dokumen	-
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	1 laporan	30.000.000,00	APBD		1 laporan	45.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	18 laporan	59.000.000,00	APBD		18 laporan	35.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	2 dokumen	79.000.000,00	APBD		2 dokumen	20.000.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>82 orang</b>	<b>987.429.861</b>	<b>APBD</b>		<b>86 Orang</b>	<b>1.300.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Prov. Kaltim	3 paket	284.373.000,00	APBD		3 paket	400.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kaltim	78 orang	526.627.901	APBD		85 orang	700.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kaltim	10 orang	176,428,960,00	APBD		12 orang	200.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>113 unit</b>	<b>2.612.085.937</b>	<b>APBD</b>		<b>117 unit</b>	<b>3.656.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 paket	25.478.425,00	APBD		1 paket	60.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	6 paket	57.186.964,00	APBD		6 paket	300.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Kaltim	2 paket	853.471.714,00	APBD		2 paket	200.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penggandaan								
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Prov. Kaltim	96 dokumen	15.791.600,00	APBD		96 dokumen	16.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Prov. Kaltim	1 laporan	68.352.922,00	APBD		1 laporan	400.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	3 laporan	1.481.172.312,00	APBD		3 laporan	2.480.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Kaltim	1 dokumen	110.632.000,00	APBD		1 dokumen	200.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>33 unit</b>	<b>1.649.365.310,00</b>	<b>APBD</b>		<b>34 Unit</b>	<b>1.684.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 unit	581.662.000,00	APBD		1 unit	784.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov. Kaltim	30 unit	1.067.703.310,00	APBD		30 unit	900.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>4 jenis jasa</b>	<b>3.066.160.176,00</b>	<b>APBD</b>		<b>4 jenis jasa</b>	<b>3.227.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	1 laporan	10.902.000,00	APBD		1 laporan	17.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 laporan	809.182.200,00	APBD		1 laporan	700.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 laporan	9.360.000,00	APBD		1 laporan	110.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 laporan	2,236.715.976,00	APBD		1 laporan	2.400.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>87 unit</b>	<b>599.196.419,00</b>	<b>APBD</b>		<b>88 unit</b>	<b>885.000.000,00</b>

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Prov. Kaltim	1 unit	56.004.999,00	APBD		1 unit	65.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prov. Kaltim	24 unit	288.655.420,00	APBD		25 unit	250.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Prov. Kaltim	60 unit	94.332.000,00	APBD		60 unit	70.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Kaltim	1 unit	160.204.000,00	APBD		1 unit	500.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumbu r dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		Prov. Kaltim		<b>10.019.921.260,00</b>	APBD			<b>10.730.000.000,00</b>
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</b>	Prov. Kaltim	<b>300 orang</b>	<b>2.527.267.258,00</b>	APBD		<b>300 orang</b>	<b>2.135.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	<b>Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>563.730.648,00</b>	<b>APBD</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>715.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Prov. Kaltim	1 laporan	337.599.560,00	APBD		1 laporan	465.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Prov. Kaltim	1 dokumen	126.131.500,00	APBD		1 dokumen	150.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Prov. Kaltim	30 orang	99.999.588,00	APBD		35 orang	100.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah organisasi masyarakat menuju LPLPP</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>658.937.430,00</b>	<b>APBD</b>			<b>500.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi masyarakat/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Prov. Kaltim	200 orang	260.999.568,00	APBD		450 orang	250.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi masyarakat/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Prov. Kaltim	1 lembaga	397.937.862,00	APBD		2 lembaga	250.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>300 orang</b>	<b>1.304.599.180,00</b>	<b>APBD</b>		<b>300 orang</b>	<b>920.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	Prov. Kaltim	1 lembaga	139.040.455,00	APBD		1 lembaga	150.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Prov. Kaltim	100 orang	999.559.157,00	APBD		300 orang	600.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	Prov. Kaltim	1 unit	165.999.568,00	APBD		1 unit	170.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>24.96%</b>	<b>3.066.626.186,00</b>	<b>APBD</b>		<b>24.96%</b>	<b>3.359.907.948,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>1.596.900.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>1.700.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 dokumen	829.500.000,00	APBD		3 dokumen	900.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	20 Perangkat Daerah	767.400.000,00	APBD		10 Perangkat Daerah	800.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>80 %</b>	<b>1.111.658.820,00</b>	<b>APBD</b>		<b>85%</b>	<b>1.259.907.948,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Prov. Kaltim	40 orang	868.280.000,00	APBD		40 orang	770.500.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	50 layanan	243.378.820,00	APBD		60 layanan	489.407.948,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>358.067.366,00</b>	<b>APBD</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>400.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Prov. Kaltim	60 Orang	358.067.366,00	APBD		60 Orang	400.000.000,00
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Predikat kabupaten/kota layak anak</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>90 Persen</b>	<b>1.592.898.889,00</b>	<b>APBD</b>		<b>90 Persen</b>	<b>1.800.000.000</b>
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>634.899.068</b>	<b>APBD</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>800.000.000,00</b>

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumbu r dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Prov. Kaltim	3 perangkat daerah	330.999.529	APBD		30 perangkat daerah	350.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 Dokumen	303.899.539	APBD		1 dokumen	450.000.000
	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>957.999.821</b>	<b>APBD</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Prov. Kaltim	1 kegiatan	393.999.911,00	APBD		1 kegiatan	400.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Prov. Kaltim	1 kegiatan	563.999.910,00	APBD		1 kegiatan	600.000.000,00
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>3.88%</b>	<b>2.780.495.074,00</b>	<b>APBD</b>		<b>3.88%</b>	<b>3.446.907.948,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Lembaga</b>	<b>1.800.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 dokumen	900.000.000,00	APBD		1 dokumen	900.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	Prov. Kaltim	1 Kebijakan	700.000.000,00	APBD		1 Dokumen	900.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>80 layanan</b>	<b>172.716.590</b>	<b>APBD</b>		<b>85 Layanan</b>	<b>357.500.000</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	30 orang	172.716.590,00	APBD		50 orang	357.500.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	80 Layanan	314.018.484,00	APBD		50 orang	489.407.948,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumbu r dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>693.760.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Lembaga</b>	<b>800.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 dokumen	693.760.000,00	APBD		1 dokumen	800.000.000,00
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase Capaian Data Gender dan anak</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>80%</b>	<b>1.006.499.454,00</b>	<b>APBD</b>		<b>80%</b>	<b>1.150.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>20 data</b>	<b>1.006.499.454,00</b>	<b>APBD</b>		<b>20 data</b>	<b>1.150.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Prov. Kaltim	4 dokumen	505.249.714,00	APBD		2 dokumen	550.000.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Prov. Kaltim	6 dokumen	501.249.740,00	APBD		2 dokumen	600.000.000,00
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Prov. Kaltim</b>		<b>1.930.713.873,00</b>	<b>APBD</b>			<b>2.450.000.000,00</b>
	[ PROGRAM ] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Prov. Kaltim	80%	705.455.220,00	APBD		80 Persen	900.000.000,00
	[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	Prov. Kaltim	1 dokumen	550.712.216,00	APBD		1 dokumen	700.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	3 laporan	461.805.112,00	APBD		1 laporan	600.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	1 laporan	88.907.104,00	APBD		1 laporan	100.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>154.743.004,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	1 laporan	82.913.300,00	APBD		1 laporan	100.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	1 laporan	71.829.704,00	APBD		1 laporan	100.000.000
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	Prov. Kaltim	<b>100%</b>	<b>724.664.060,00</b>	APBD			<b>800.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>380.172.620,00</b>	<b>APBD</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>400.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	1 laporan	297.004.620,00	APBD		1 laporan	300.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	1 laporan	83.168.000,00	APBD		1 laporan	100.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>344.491.440,00</b>	<b>APBD</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>400.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	1 laporan	88.920.000,00	APBD		1 laporan	100.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	1 laporan	255.571.440,00	APBD		1 laporan	300.000.000,00
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Publikasi data kependudukan skala provinsi</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>2 kali</b>	<b>500.594.593,00</b>	<b>APBD</b>		<b>2 Kali</b>	<b>750.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>28 %</b>	<b>309.785.413,00</b>	<b>APBD</b>		<b>29%</b>	<b>500.000.000,00</b>
	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	1 laporan	81.644.927,00	APBD		1 laporan	200.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	1 laporan	36.125.496,00	APBD		1 laporan	100.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kependudukan								
	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Prov. Kaltim	3 dokumen	192.014.990,00	APBD		1 dokumen	200.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>190.809.180,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>250.000.000,00</b>
	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	1 laporan	37.760.000,00	APBD		1 laporan	50.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Prov. Kaltim	60 orang	153.049.180,00	APBD		40 orang	200.000.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		<b>Prov. Kaltim</b>		<b>2.368.437.338,00</b>	<b>APBD</b>			<b>2.530.000.000,00</b>
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Angka kelahiran total</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>60%</b>	<b>607.890.285,00</b>	<b>APBD</b>		<b>60%</b>	<b>730.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>5 sektor</b>	<b>607.890.285,00</b>	<b>APBD</b>		<b>5 sektor</b>	<b>730.000.000,00</b>
	<b>[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi GDPK</b>	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Prov. Kaltim	3 laporan	277.901.588,00	APBD		1 laporan	300.000.000,00
	<b>[ SUB KEGIATAN ] Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Prov. Kaltim	2 laporan	329.998.697,00	APBD		1 laporan	430.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Angka prevalensi kontrasepsi modern</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>68.42%</b>	<b>641.647.945,00</b>	<b>APBD</b>		<b>68.42%</b>	<b>800.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Ratio akseptor KB</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>0.76%</b>	<b>641.647.945,00</b>	<b>APBD</b>		<b>0.76%</b>	<b>800.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Prov. Kaltim	1 daerah	170.648.532,00	APBD		1 daerah	300.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Prov. Kaltim	1 daerah	370.999.800,00	APBD		1 daerah	250.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Prov. Kaltim	1 dokumen	99.999.613,00	APBD		1 dokumen	250.000.000,00
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>65,54 indeks</b>	<b>1.118.899.108,00</b>	<b>APBD</b>		<b>65,54 indeks</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>4 organisasi</b>	<b>1.019.899.556,00</b>	<b>APBD</b>		<b>4 organisasi</b>	<b>850.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prov. Kaltim	1 dokumen	920.900.000,00	APBD		1 dokumen	700.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Prov. Kaltim	2 organisasi	98.999.556,00	APBD		1 organisasi	150.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>[ KEGIATAN ] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>40%</b>	<b>98.999.552,00</b>	<b>APBD</b>		<b>40%</b>	<b>150.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Prov. Kaltim	1 laporan	98.999.552,00	APBD		1 laporan	150.000.000,00
					<b>41.767.605.000</b>				<b>41.183.426.292</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berfungsi sebagai Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

#### Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

- a. DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 -2026
- b. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 dan tahun 2022
- c. Harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seluruh bidang teknis
- d. Penyusunan Renja sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- e. Penyusunan Renja Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



# LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 13 TELP. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405  
e-mail : [dkp3a.provkaltim@gmail.com](mailto:dkp3a.provkaltim@gmail.com)  
S A M A R I N D A 75117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 050/184/I/DKP3A/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 g Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur perlu didukung dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang no 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2009;
  6. Peraturan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2011;
  9. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050/K. 180 Tahun 2013

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim RENJA di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim RENJA di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Menghimpun program dan kegiatan serta pagu anggaran belanja langsung tahun 2025.
  - b. Menyusun RENJA Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
  - c. Mengisi format tabel Rumusan Rencana dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
  - d. Menyampaikan RENJA Tahun 2025 kepada Bappeda sesuai RENSTRA Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur untuk Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 untuk diverifikasi.
- KETIGA : Memberikan wewenang kepada Ketua RENJA untuk mengangkat sekretaris dan anggota sesuai kebutuhan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : Juli 2024



Kepala,

H. Noryani Sorayalita, SE, MMT  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196512151986012002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR : 050/ /I/DKP3A/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS  
KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

---

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Pengarah : Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Ketua : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas  
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
Anak Provinsi Kalimantan Timur

Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan  
Anak  
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana  
3. Kepala Bidang Kesetaraan Gender  
4. Kepala Bidang Sistem Informasi Data Gender dan Anak  
5. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi  
Kependudukan  
6. Kepala Sub Bagian Keuangan  
7. Kepala Sub Bagian Umum

Kesekretariatan : Penyusun Laporan dan Evaluasi

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :  
 050/184/I/DKP3A/2024 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
 KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

---

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS  
 KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
 ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan RENJA tahun 2025, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi RENJA tahun 2025
- b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim kelompok kerja RENJA tahun 2025

2. Penanggung jawab

- a. Bertanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun RENJA tahun 2025
- b. Mengkoordinasikan setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun RENJA tahun 2025
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun RENJA tahun 2025 untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim

3. Ketua

- a. Mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusunan RENJA tahun 2025 dengan RENJA tahun lalu
- b. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun RENJA tahun 2025
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusunan kepada penanggung jawab RENJA tahun 2025

d. Menganalisis permasalahan dan kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim

4. Anggota

- a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu
- b. Mengumpulkan dan mengelola data pendukung RENJA tahun 2025
- c. Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov.Kaltim
- d. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim
- e. Melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD
- f. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan
- g. Menghitung capaian kinerja program kegiatan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal Juli 2024



Kepala,

Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT  
Rembina Utama Muda  
Np. 196512151986012002



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 13 TELP. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405

e-mail: [depda.provkalim@gmail.com](mailto:depda.provkalim@gmail.com)  
 SAMARINDA 75117

**HASIL KESEPAKATAN**  
**FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALTIM TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024 bertempat di Hotel Swiss Bell Balikpapan telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana dalam daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi oleh Bappeda Provinsi Kaltim (Mispoyo, S.Pd, M.Pd)
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Maret 2024

Jam : 08.00 s/d 13.00 Wita

Tempat : Hotel Swiss Bell Balikpapan

Forum Perangkat Daerah Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 :

**MENYEPAKATI**

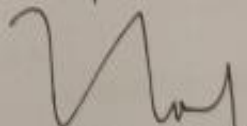
- KESATU** : Isu strategis Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan Renstra Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim Tahun 2025 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil diskusi antar narasumber dan peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim Tahun 2025 telah disepakati sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim Tahun 2024 – 2026

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

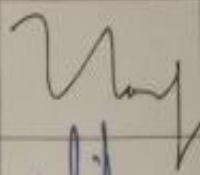
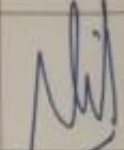

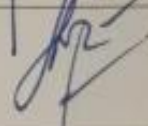


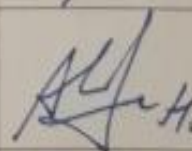



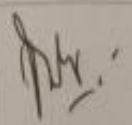
Samarinda, 5 Maret 2024

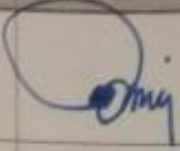
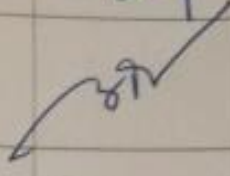
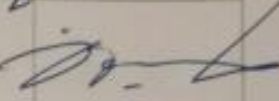
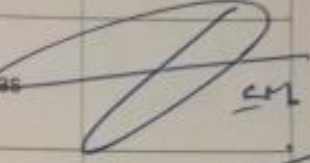
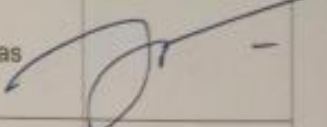
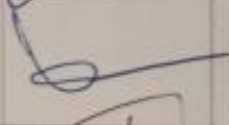
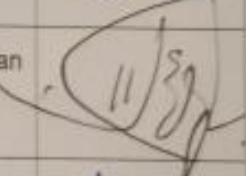

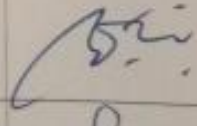
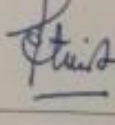
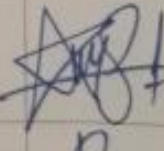

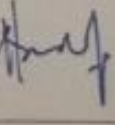
Kepala Dinas,



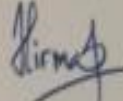
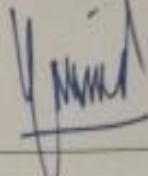

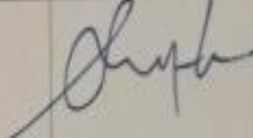
  
Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19651215 189601 2 002

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas  
Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim  
Tahun 2024

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT	DKP3A Provinsi Kaltim	Kepala Dinas	
2	Mispoyo, S.Pd, M.Pd	Bappeda Provinsi Kaltim	Kabid. PPM	
3	Dra. Alwiati A.Apt	DP3AKB Kota Balikpapan	Kepala Dinas	
4	Dr. Baharuddin, MM	DPPKB Kota Bontang	Kepala Dinas	
5	Dr. Sulastin	DPPPA Kabupaten Kutai Timur	Kepala Dinas	
6	Syarifuddin Nur	DP2PA Kota Samarinda	Kabid. PP	
7	Akhmad Sofyan	DPPPA Kabupaten Kutai Kartanegara	Jabatan Fungsional	
8	Zita Davung Paran	Dinsos & PPPA Kabupaten Mahakam Ulu	Kabid. PPPA	
9	Yuniarsih	DP2P3A Kabupaten Penajam Paser Utara	Kassubag Umum	
10	Umar, SKM, M.Ph	P2KBP3A Kabupaten Paser	Jabatan Fungsional	
11	dr. Hj. Halijah Yasin	DP2KBP3A Kabupaten Berau	Sekretaris	

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
12	Tirta Dewi	Disduk Capil Kota Balikpapan	Kepala Dinas	
13	H. Budiman, S.Sos, M.Ap	Disduk Capil Kota Bontang	Kepala Dinas	
14	Jumeah	Disduk Capil Kabupaten Kutai Timur	Kepala Dinas	
15	David Pamuji	Disduk Capil Kabupaten Berau	Kepala Dinas	
16	M. Isnaini Yanuardi S, Hut, MM	Disduk Capil Kabupaten Paser	Kepala Dinas	
17	Alfonsius Belawah, S.P	Disduk Capil Kabupaten Mahakam Uu	Kabid. Pelayanan Pendaftaran penduduk	
18	H. Andi M. Thaha	Disduk Capil Kabupaten PPU	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
19	Veronika Hinum	Dinas PP dan KB Kota Samarinda	Sekretaris	
20	Katarina	Dinas Sosial Provinsi Kaltim	Peksos	
21	Isbudi Setiawati	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Kaltim	Kasubag Umum	
22	Bambang Hadi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim	Analis Saprasi	
23	Roni	Dinas Perkebunan provinsi Kaltim	Pelaksana	
24	Nur Suanti	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Kaltim	Pelaksana	

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
25	Anna Midawaty	BPSDM Provinsi Kaltim	Sekretaris	
26	Juwita, K.D	BKKBN Perwakilan Provinsi Kaltim	Analisis	
27	Harahap Irma Oktarini, SE	Inspektorat Kaltim	Auditor Penyelia	
28	Hj. SB. Yaumid	KPPI Provinsi Kaltim	Ketua	
29	drg.J. Astuti Tomi, M.Si	BKOW Provinsi Kaltim	Ketua	
30	Selamat Said Sanib, S.Pd	KPAD Prov. Kaltim	Wakil	
31	Dr. Suryaningsih, MH	PSKG Unmul Samarinda	Ketua	
32	Rumainur, M.Pd.I	UINSI Samarinda	Kepala PSGA	